



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
**UNIT KERJA** : DEWAN PENGAWAS

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HARJONO
2. Jabatan : ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
3. NHK : 13672

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 6.050.000.000

1. Tanah Seluas 5165 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI  
Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/45 m2 di KAB / KOTA  
BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA  
SURABAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 550.000.000
4. Bangunan Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA ,  
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Bangunan Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA ,  
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah Seluas 2010 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL  
SENDIRI Rp. 400.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 364 m2/87 m2 di KAB / KOTA  
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
8. Tanah Seluas 633 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI  
Rp. 500.000.000
9. Tanah Seluas 985 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI  
Rp. 750.000.000
10. Tanah Seluas 824 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI  
Rp. 350.000.000
11. Tanah Seluas 664 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI  
Rp. 250.000.000



<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	160.000.000
1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI	Rp.	70.000.000
2. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2007, HASIL SENDIRI	Rp.	90.000.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	2.665.250.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	368.025.703
<b>Sub Total</b>	Rp.	9.243.275.703
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	9.243.275.703

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.